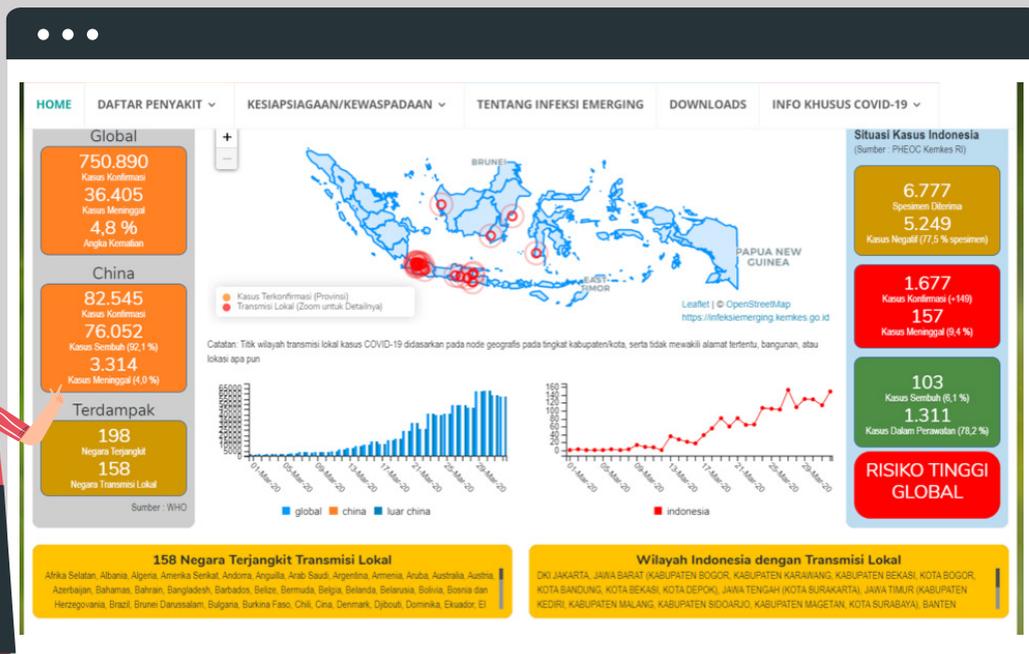


OGI NEWS

Peran Open Data dan Social Accountability dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia

Pada bulan Maret 2020, tim peneliti kebencanaan dari IPSK LIPI, UI, UGM, ITB, STIS, U-INSPIRE, dan JBK Indonesia mengadakan kaji cepat Studi Sosial COVID-19 untuk mengetahui persepsi publik terkait pembukaan data pasien positif COVID-19 seperti identitas diri, alamat tinggal, dan riwayat perjalanan. Hasilnya, 61,2% responden setuju jika identitas pasien positif COVID-19 perlu dibuka dan lebih dari 97% responden juga setuju jika riwayat perjalanan pasien tersebut dibuka. Berangkat dari fakta ini,

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) mengadakan webinar OGI Talk dengan tema “Peran Open Data dan Social Accountability dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. Tujuan webinar ini adalah untuk mendiseminasikan nilai *open government* kepada publik seperti transparansi dan partisipasi. Selain, webinar ini juga bertujuan untuk menggali aspirasi, masukan, dan pendapat dari publik mengenai penanganan COVID-19 dalam konteks *open government*.

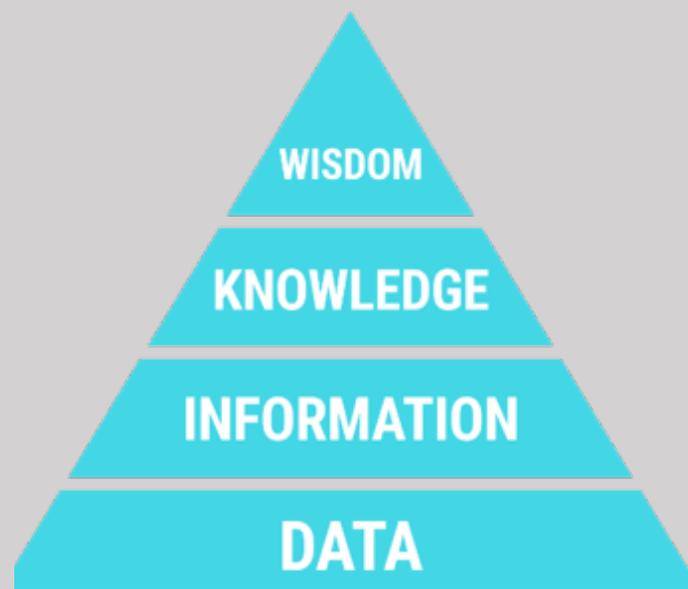


Gambar 1. Laman Website Terkait COVID-19 dari Kementerian Kesehatan
Sumber: COVID19.kemkes.go.id

Pembicara pertama dalam webinar ini adalah Arthur Glenn Maail, selaku Research Manager Open Data Lab Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa terdapat solusi dalam penggunaan data yang tidak mengorbankan privasi individu. Misalnya, inovasi teknologi untuk mendapatkan sumber data lain terkait COVID-19 yang telah diterapkan di berbagai negara. Inovasi teknologi tersebut berupa *digital tracking* yang telah digunakan di 19 negara. Selanjutnya, *advanced physical surveillance* juga telah digunakan di 4 negara. Aplikasi ini dilengkapi dengan alat pengenalan wajah dan sensor suhu, sehingga memungkinkan adanya pembatasan fisik bagi mereka yang sedang demam. Teknologi tersebut menggunakan data pribadi individu

namun tetap berpegang pada regulasi dan keputusan hukum yang berlaku di setiap negara.

Publik juga perlu mengetahui mengenai perbedaan antara data dan informasi untuk menghindari adanya misinterpretasi data. Informasi adalah data yang sudah diolah. Informasi dapat berbentuk instruksi, perintah, saran, jawaban, sejarah, dan prediksi (Buck, 1983). Kebutuhan tentang data dan kebutuhan terkait informasi perlu diperhatikan mengingat kompleksitas pandemi COVID-19. Misalnya, data jumlah kematian bisa jadi penting bagi media tapi tidak bagi sektor lain. Selain itu, perlu ada penekanan mengenai data apa saja yang perlu diolah.



Gambar 2. Ilustrasi Jenjang Perbedaan Data dan Informasi
Sumber: Paparan Arthur Glenn Maail

Ada tiga tantangan inovasi keterbukaan data. Pertama, aksesibilitas data seringkali menjadi kendala. Misalnya, tingkat granularitas yang cukup tinggi yakni data di level nasional bisa jadi tidak memadai di level lokal. Kedua, penggunaan dan diseminasi juga menjadi kendala. Perlu adanya *infomediary* (pengolah data) yang

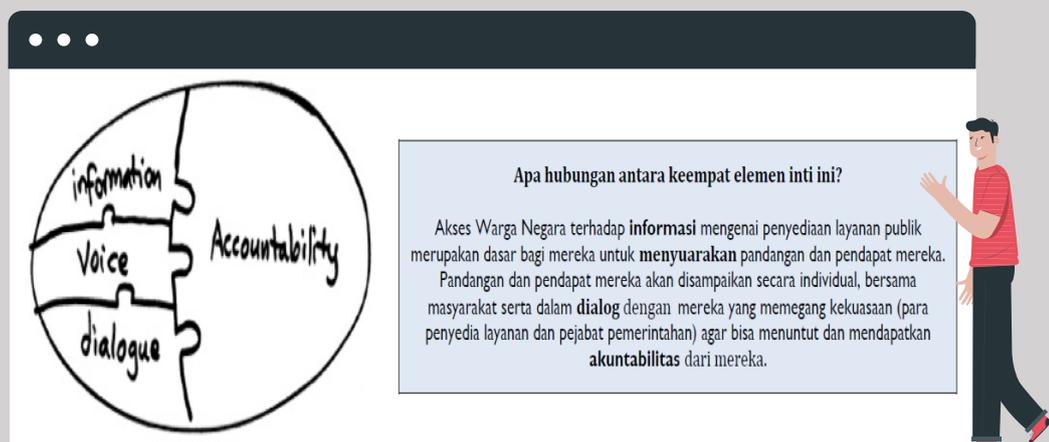
membantu masyarakat untuk menerjemahkan data kompleks terkait COVID-19 agar dapat dipahami oleh masyarakat. *Infomediary* dapat berupa *data scientist* atau ahli di bidang kesehatan. Ketiga, perlu adanya mekanisme *feedback* (umpan balik) yang memungkinkan partisipasi masyarakat dan kerja sama antar pemangku kepentingan.

Narasumber kedua adalah Junito Drias yang merupakan Advocacy Manager Wahana Visi Indonesia (WVI). Beliau menjelaskan pentingnya akuntabilitas sosial yakni adanya akuntabilitas untuk program pemerintah yang didasarkan pada pelibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dipicu oleh ketersediaan data dan informasi. Dalam situasi pandemi ini, jika data terkait COVID-19 disamarkan, maka akan memicu masyarakat apatis. Namun, jika data dibuka dan tidak dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan partisipasi masyarakat yang salah. Misalnya, data yang didapat dari media sosial membuat seorang pimpinan daerah menutup akses sebuah pulau. Akuntabilitas sosial kemudian hadir untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dan menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa unsur penting dari akuntabilitas sosial. Misalnya, dalam akuntabilitas sosial, perlu adanya kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat yang mana masyarakat dapat terlibat. Selanjutnya, program yang memiliki akuntabilitas sosial adalah program yang bisa diinisiasi dan didukung oleh masyarakat atau pemerintah, atau keduanya. Program semacam ini lahir dari dorongan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga bersifat

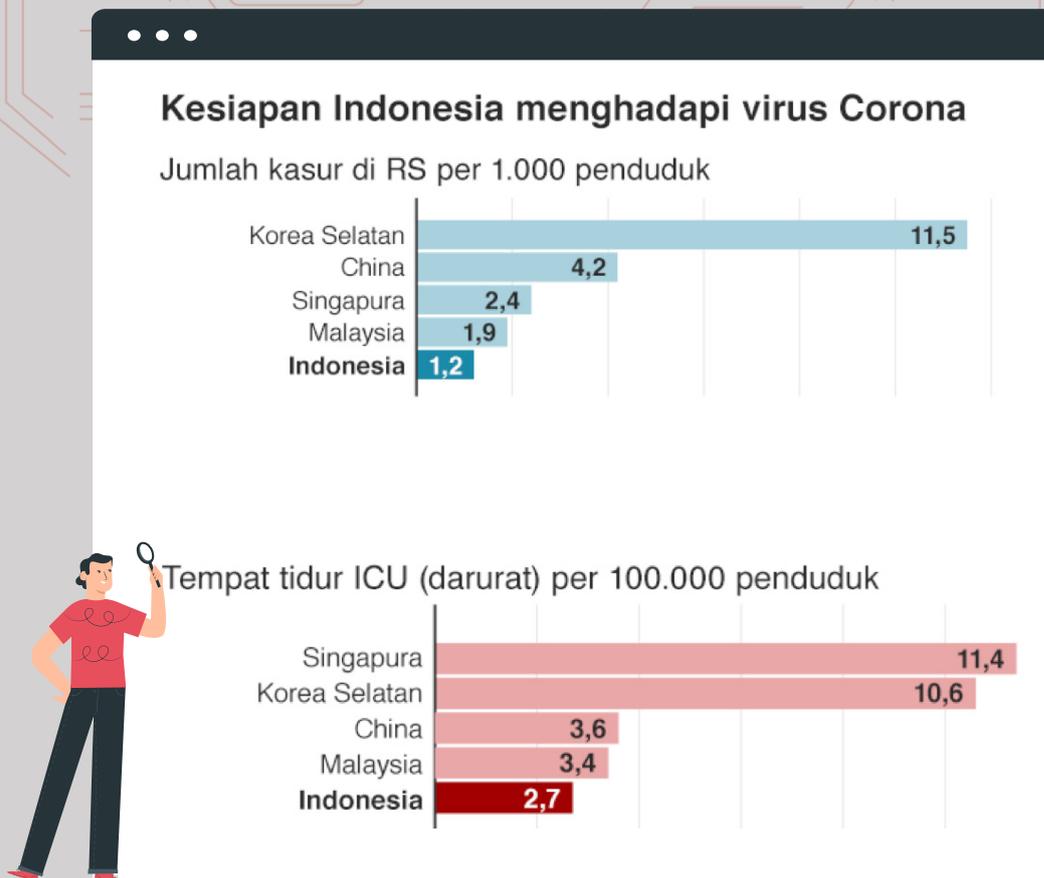
bottom-up. Terakhir, ketersediaan penganggaran serta perhatian pada aspek pelayanan publik dalam setiap kebijakan. Namun, perlu ditekankan bahwa pelibatan dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang berbeda. Masyarakat bisa saja berpartisipasi tapi tidak terlibat. Pelibatan masyarakat berada di atas partisipasi masyarakat. Misalnya, apakah gugus tugas di daerah pernah bertanya bagaimana setiap kebijakan penanganan COVID-19 sebaiknya diimplementasikan menurut masyarakat setempat.

Setiap kebijakan yang lahir harus menjawab kebutuhan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat pada pemerintah kurang, berarti kebijakannya belum bisa menjawab kebutuhan. Seharusnya ada *collaborative partnership*, agar pemerintah dan masyarakat dapat saling membantu dan menghasilkan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, publik membutuhkan kanal atau mekanisme umpan balik yang dibagi per kluster komunitas atau isu supaya mereka dapat bersuara dengan baik. Salah satu komunitas yang tidak boleh dinihilkan pelibatannya adalah anak-anak. Anak-anak mempunyai komunitas dan dapat menyuarakan pandangan mereka, apabila dikuatkan kapasitas dan diberikan kesempatan.



Gambar 3. Akuntabilitas Sosial melalui Citizen Voice and Action
Sumber: Paparan Junito Drias

Narasumber ketiga adalah Andi Taufan Garuda Putra yang merupakan Staf Khusus Presiden. Beliau menjelaskan bahwa terdapat keterbatasan dalam menghadapi bencana non-alam karena infrastruktur Indonesia masih belum mendukung jika dilihat dari standar pelayanan yang ada. Selain itu, sistem pelayanan kesehatan belum terintegrasi dengan baik, serta alat-alat medis di rumah sakit rujukan pun masih terbatas. Dalam hal ini, pemerintah akan bekerja sama dengan publik untuk menangani COVID-19 melalui berbagai macam mekanisme yang tersedia.



Gambar 4. Kesiapan Fasilitas Kesehatan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi
Sumber: WHO, Bank Dunia (data diakses 18 Maret 2020 dan diunduh dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51958299>)

Terkait dengan transparansi data dan informasi, pemerintah pusat membuat tiga *website* sebagai kanal informasi resmi terkait penanganan COVID-19. Namun, pengumpulan dan diseminasi data tidak selamanya berjalan mulus. Terdapat beberapa tantangan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data. Pertama, ada fragmentasi dari sistem yang ada di lapangan. Sistem pendataan terlalu banyak sehingga sulit untuk mengumpulkan data. Saat ini, pemerintah berusaha melakukan integrasi data agar semua pemangku kepentingan

memiliki pandangan yang sama berkenaan dengan COVID-19 dan kapasitas kesehatan di Indonesia. Kedua, alur data masih perlu dibenahi, terutama sistem verifikasi berjenjang yang dapat membantu konsolidasi dan sinkronisasi data di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ketiga, adanya kesulitan komunikasi data pada pemangku kepentingan terkait data ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19 beserta kelengkapan logistik Rumah Sakit.